

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 9
TAHUN 2013 TENTANG PENGATURAN PASAR TRADISIONAL**

Fajrul Umami, Zainal Hidayat
Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Trading is one of the chosen affairs of a decentralized system. With the existence of trade affairs, it can contribute to the economic sector of a region. One of the supporting sectors of the economy from trade affairs is the existence of traditional markets. Nowadays, the existence of traditional markets is increasingly threatened because the emerging of many modern markets. Through the Semarang City Regulation number 9 of year 2013 concerning Traditional Market Arrangements, the Local Government of Semarang City is committed to optimizing the existence of traditional markets as a part of the regional economic resources. The problem that arises is how to implement the Semarang City Regulation number 9 of years 2013 concerning Traditional Market Arrangements. The purpose of this study is to know the implementation of the Semarang City Regulation number 9 of year 2013 concerning Traditional Market Arrangements and find an influencing factors. This study uses a qualitative descriptive method, with a method of analyzing data according to Spradley and testing the validity with source triangulation techniques. The results of this study show that the Semarang City Regulation Number 9 of year 2013 concerning Traditional Market Arrangements is still not implemented well in accordance with the stated goals. Supported factors are coordination, social condition, and technology advance. Inhibiting factors are leadership, communication, commitment level of actors, and environmental conditions. Based on these concern, Dinas Perdagangan should give a leadership training program for Kepala UPTD Pasar and Kepala Pasar, repair the communication systems both vertical and horizontal, make a routine control to performance of implementing actors, and repair the facilities in traditional market with another institution.

Key Words: Implementation, Traditional Market, Arrangement, Coordination, Social Condition, Technology Advance.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan merupakan salah satu sektor penunjang aktivitas perekonomian. Salah satu penyumbang pendapatan untuk pembangunan dari sektor perdagangan yaitu dari keberadaan pasar. Namun pembangunan pada sektor ritel khususnya yang berkembang pesat yang terjadi saat ini, tidak melibatkan unsur kepekaan terhadap keberadaan dan kelangsungan pasar tradisional. Padahal, keberadaan pasar tradisional merupakan salah satu pilar perekonomian yang menguasai 67,6 persen pangsa dan menghidupi lebih dari 12 juta orang.

Seperti dijelaskan dalam laman industri.bisnis.com, data dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) menyebutkan jumlah pasar tradisional di seluruh Indonesia turun drastis dari 13.540 pasar tradisional menjadi 9.950 pasar dalam waktu 4 tahun periode 2007-2011. Selain itu, hasil survei AC Nielsen tahun 2013 lalu menunjukkan jumlah pasar

tradisional di Indonesia terus mengalami penurunan. Pada 2007 pasar tradisional berjumlah 13.550, sementara pada 2009 menyusut menjadi 13.450, dan pada 2011 berjumlah 9.950. Penurunan itu disebabkan karena ekspansi yang dilakukan pasar modern tidak hanya di wilayah perkotaan, namun merambah ke pelosok desa di Tanah Air. Akibatnya, jumlah pasar tradisional semakin berkurang karena kalah bersaing dengan pasar modern. Sementara itu, dimuat dalam media elektronik kompas.com, perbandingan pertumbuhan pasar tradisional terhadap pasar modern cukup drastis, yaitu pasar tradisional hanya kurang dari 8,1 persen, sedangkan pasar modern 31,4 persen.

Melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional, pemerintah Kota Semarang berkomitmen untuk terus menjaga dan melestarikan eksistensi pasar tradisional, serta untuk mengoptimalkan kelangsungan pasar tradisional. Namun seiring

berjalannya waktu sampai saat ini (5 November 2016), kenyataan yang ada di lapangan bisa dikatakan belum sesuai dengan harapan. Masih terdapat beberapa permasalahan yang ditemui di salah satu pasar tradisional di Kota Semarang.

Permasalahan tersebut diantaranya yaitu: lapak pedagang yang tidak tertib, parkir yang belum tertata dengan rapih, pengelolaan sampah yang kurang maksimal, sanitasi pasar yang tidak berfungsi dengan baik, adanya barang dagangan yang diletakan di lorong pasar, dan masih rusaknya akses jalan menuju pasar, masih ada pedagang yang berjualan di lahan sempadan sungai, dan lain sebagainya. Maka dari itu, perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang

Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional?

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional
2. Menganalisis faktor yang mempengaruhi dan menghambat implementasi penyelenggaraan Kebijakan Pengaturan Pasar Tradisional di Kota Semarang

D. Kajian Teori

Implementasi Kebijakan

Lester dan Stewart dalam Agustino (2014) mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu proses dan suatu hasil. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir, yaitu

tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Selain itu, Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2008) mencoba mengemukakan definisi mengenai makna dari implementasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, makna mengenai implementasi kebijakan juga dijelaskan oleh Merrile Grindle dalam Agustin (2014), bahwa pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari *individual project* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Berdasarkan beberapa definisi menurut para ahli yang sudah dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu :

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan
3. Adanya hasil kegiatan

Model-Model Implementasi

1. Model George C. Edward

Menurut pandangan Edward III dalam Subarsono (2010), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu: (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Disposisi, dan (4) Struktur Birokrasi.

2. Model Merile S. Grindle

Menurut Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2010) dipengaruhi oleh dua variable besar, yaitu isi kebijakan (konten) dan lingkungan kebijakan (konteks). Konten kebijakan mencakup: (1) Pihak yang kepentingannya dipengaruhi, (2) Jenis manfaat yang diperoleh, (3)

Jangkauan perbuatan yang dapat diharapkan; (4) Kedudukan pengambil keputusan; (5) Pelaksana program; dan (6) Sumber-sumber yang dapat disediakan. Sedangkan konteks kebijakan mencakup: (1) Kekuasaan, minat dan strategi aktor kebijakan, (2) Karakteristik rezim dan institusi, dan (3) Kesadaran dan sifat responsif.

3. Model Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2010), ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: karakteristik dari masalah, karakteristik kebijakan, dan Variabel lingkungan.

Karakteristik dari masalah kebijakan mencakup: (1) Tingkat kesulitan teknis masalah yang bersangkutan, (2) Tingkat kemajemukan kelompok sasaran, (3) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, dan (4)

cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.

Karakteristik kebijakan mencakup: (1) Kejelasan isi kebijakan, (2) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoretis, (3) Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut, (4) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana, (5) Kejelasan dan konsistensi aturan, dan (6) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan, dan (7) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

Variabel lingkungan mencakup: (1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, (2) dukungan publik terhadap sebuah kebijakan, (3) sikap dari kelompok pemilih, dan (4) tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

4. Model Donald S. van Meter dan Carl E. Van Horn
Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2010), variabel-variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan publik, yaitu: (1) Standar dan sasaran kebijakan, (2) Sumberdaya, (3) Hubungan antar organisasi, (4) Karakteristik agen pelaksana, (5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi, dan (6) Disposisi implementor atau sikap para pelaksana.
5. Model David L. Weimer dan Aidan R. Vining
Weimer dan Vining dalam Subarsono (2010) ada tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program: (1) Logikan kebijakan, (2) Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan, dan (3) Kemampuan implementor kebijakan.
6. Model Shabbiri Cheema dan Dennis A. Rondinelli

Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam Subarsono (2010) mengemukakan bahwa terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. Variabel tersebut diantaranya: (1) kondisi lingkungan, (2) Hubungan antar organisasi, (3) Sumberdaya organisasi untuk implementasi program, (4) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan sumber pustaka. Teknik yang digunakan untuk menginterpretasi data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis dari spradley dengan tahap analisis domain dan taksonomi. Untuk menguji kualitas data, digunakan teknik triangulasi yaitu

membandingkan dan mengecek data melalui sumber-sumber lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2013

Penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional dikaji berdasarkan tujuan yang tertuang dalam peraturan tersebut. Selanjutnya, dari tujuan tersebut digali kegiatan, tindakan, atau aktivitas apa saja yang sudah dilakukan demi menunjang tercapainya tujuan pengaturan pasar yang sudah ditetapkan.

Tujuan pengaturan pasar tradisional untuk menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat belum diinterpretasikan dengan adanya tindakan yang tegas dalam menertibkan lorong pasar, belum diterapkannya zonasi pedagang, belum efektifnya pengelolaan izin pedagang pasar, belum tersedia petugas dan sarana keamanan pasar,

belum didukung oleh penyuluhan dan edukasi tentang masalah sampah kepada pedagang, dan belum adanya tindakan yang tepat dalam menciptakan sanitasi pasar yang berfungsi dengan baik.

Tujuan pengaturan pasar tradisional untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sudah diinterpretasikan dengan adanya tindakan dan upaya koordinasi berbagai pihak untuk memperbaiki akses jalan pasar. Namun belum didukung dengan adanya penyelenggaraan pelayanan pasar secara menyeluruh dan bangunan pasar yang sesuai dengan kebutuhan pedagang.

Tujuan pengaturan pasar tradisional untuk menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah sudah diinterpretasikan dengan adanya tindakan atau upaya penarikan retribusi dari hasil pengelolaan pasar, pemberian kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar (sebagai pedagang, petugas kebersihan, atau petugas parkir resmi), serta tidak

melarang adanya aktivitas di luar pasar yang dijadikan sebagai mata pencaharian masyarakat (seperti warung dan jasa parkir lahan pribadi).

Tujuan pengaturan pasar tradisional untuk menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing sudah diinterpretasikan dengan adanya tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pengelola pasar dan juga pedagang. Pihak pengelola pasar memberikan keleluasaan bagi pedagang dalam menentukan sendiri barang yang akan di jual, sedangkan pedagang yang menentukan harga barangnya masing-masing sesuai dengan kualitas barang yang dimiliki. Selain itu, tujuan ini juga sudah diinterpretasikan dengan adanya berbagai cara yang dilakukan oleh pedagang dalam menyesuaikan barang dagangan dengan kebutuhan masyarakat seperti mengikuti tren perkembangan, melalui komunikasi pada proses tawar-menawar, dan penerapan teknik-teknik pengawetan barang dagangan.

Tujuan pengaturan pasar tradisional untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi sudah diinterpretasikan dengan adanya tindakan atau upaya untuk memperbaiki fasilitas jalan pasar yang diharapkan dapat menarik konsumen untuk berbelanja di Pasar Genuk, sehingga dapat meningkatkan pendapatan pedagang. Selain itu, sudah diinterpretasikan juga dengan adanya tindakan untuk memudahkan akses kesehatan pedagang dengan cara kerjasama antara pihak Dinas Perdagangan melalui pengelola pasar dengan pihak BPJS dalam menyediakan layanan pendaftaran BPJS Kesehatan, namun layanan tersebut belum dilaksanakan dengan optimal karena kurangnya promosi yang dilakukan oleh pengelola pasar kepada pedagang. Selain itu juga, sudah diinterpretasikan dengan adanya tindakan untuk menyediakan layanan tabungan bagi pedagang dengan cara menyediakan berbagai opsi layanan tabungan. Pihak pengelola pasar menyediakan Bank BKK, pihak paguyuban pedagang menyediakan tabungan secara

kekeluargaan (arisan), dan pihak lain menyediakan tabungan berupa bank tidak resmi.

Tujuan pengaturan pasar tradisional untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan pasar secara selaras, serasi, dan seimbang dengan penataan ruang kota secara berkelanjutan belum diinterpretasikan dengan adanya aktivitas perdagangan yang tidak bertentangan dengan tata ruang kota. Hal ini dikarenakan masih terdapat aktivitas perdagangan yang dilakukan di area sempadan sungai di samping bangunan gedung pasar. Berbagai upaya sudah dilakukan, yaitu dengan cara menyediakan area lantai 2 (dua) bagi pedagang pancaan yang berjualan di sepanjang area sempadan, koordinasi dan usul dari pihak paguyuban pedagang kepada pihak pengelola pasar agar adanya pemberian ruang atau jarak bagi pedagang dengan batas sungai, dan juga adanya usulan untuk dibuat tanggul. Namun upaya tersebut belum mampu mengatasi aktivitas perdagangan yang bertentangan dengan tata ruang kota.

Tujuan pengaturan pasar tradisional untuk mewujudkan keseimbangan antara perlindungan dan pemberdayaan pedagang sudah diinterpretasikan dengan adanya tindakan untuk menyediakan fasilitas simpan pinjam yang merupakan hasil kerjasama antara pihak Dinas Perdagangan melalui pengelola pasar dengan pihak Bank BKK. Namun, peran Bank BKK sebagai pihak yang mengelola layanan simpan pinjam belum mampu menarik minat pedagang untuk menggunakan layanan tersebut karena syarat dan ketentuan yang belum mampu disanggupi oleh pedagang. Selain itu, tujuan ini juga sudah diinterpretasikan dengan adanya kegiatan pembinaan organisasi atau serikat pedagang yang dilakukan dengan dua cara. Cara pertama yaitu adanya pembinaan di tingkat atas melalui forum komunikasi antara Dinas Perdagangan, Kepala UPTD, Kepala Pasar, dan Perwakilan Paguyuban Pedagang yang dilakukan di Kantor Dinas Perdagangan. Cara kedua yaitu adanya pembinaan di tingkat bawah

yang dilakukan oleh Kepala UPTD dan Kepala Pasar melalui kehadiran dan pendampingan di kegiatan organisasi serikat pedagang masing-masing pasar. Namun pembinaan di tingkat bawah yang dilakukan oleh Kepala UPTD dan Kepala Pasar masih belum maksimal karena kurangnya inisiatif dan responsivitas terhadap kegiatan-kegiatan organisasi serikat pedagang.

Tujuan pengaturan pasar tradisional untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pasar tradisional sudah diinterpretasikan dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan pasar. Selain itu, tindakan lain juga dilakukan dengan cara memberikan layanan secara langsung di kantor pengelola pasar atau melalui media elektronik pribadi Kepala Pasar bagi siapa saja yang ingin menyampaikan saran ataupun laporan pelanggaran. Namun, dalam penerapannya, masih kurang maksimal karena pihak yang memberikan saran atau laporan merasa tidak cepat ditanggapi jika melaporan ke Kepala Pasar, maka

dari itu pihak pelapor lebih memilih menyampaikan laporan langsung melalui media sosial Walikota.

B. Faktor Pendorong dan Penghambat

1. Faktor Pendorong

Koordinasi

Dibuktikan dengan adanya upaya perbaikan jalan dilakukan dengan adanya koordinasi yang baik antara pihak Dinas, Kelurahan, maupun masyarakat, sehingga nantinya dapat diamsukan ke dalam agenda musrembang agar menjadi anggaran di tahun berikutnya. Selain itu, dibuktikan juga dengan adanya koordinasi antara pihak Dinas Perdagangan, Pihak Pengelola Pasar, Pihak BPJS, dan Pihak Bank BKK dalam menyediakan layanan yang ada di pasar.

Kondisi Sosial dan Kemajuan Teknologi

Kondisi sosial pedagang yang sudah terbuka dan menerima perubahan dengan cara menyesuaikan barang dagangan dengan kebutuhan pedagang seperti mengikuti tren

perkembangan, melalui komunikasi pada proses tawar-menawar, dan penerapan teknik-teknik pengawetan barang dagangan menjadikan adanya barang dagangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adanya perkembangan teknologi dimanfaatkan untuk memudahkan adanya penyampaian laporan terkait pelanggaran pengelolaan pasar kepada aktor kebijakan melalui media sosial. Seperti disampaikan oleh Ibu Sri Suryanti dalam menyampaikan laporan terkait pelanggaran pengelolaan pasar yang disampaikan kepada akun media sosial Walikota karena tidak adanya respon cepat dari pihak pengelola pasar.

2. Faktor Penghambat

Kepemimpinan

Kepala Pasar masih hanya sebatas memberikan himabauan saja dalam mengatasi permasalahan ketertiban lapak pedagang. Belum ada tindakan nyata dan sifat tegas dalam menciptakan ketertiban pedagang pasar. Selain itu, Kepala Pasar Genuk juga belum memiliki responsivitas yang baik terhadap keluhan dari

pedagang dan permasalahan yang ada di pasar, sehingga belum mampu merespon kebutuhan pengguna pasar. Selain itu Kepala Pasar yang tidak kooperatif juga menyebabkan pengelolaan pasar menjadi terkendala, dibuktikan dengan adanya fenomena bahwa Kepala Pasar Genuk belum berani melakukan diskresi kepemimpinan sebagai upaya menciptakan pelayanan yang mudah untuk kepengurusan izin melalui paguyuban pedagang sebagai koordinatornya.

Komunikasi

Kurangnya komunikasi antar aktor implementasi kebijakan mengakibatkan ketidaktahuan informasi mengenai data pihak ketiga pengelola parkir yang ada di Pasar Genuk. Hal tersebut mengakibatkan sulitnya menciptakan pengelolaan parkir yang tertata dengan baik.

Tingkat Komitmen Implementor

Layanan Pendaftaran BPJS Kesehatan yang kurang diinformasikan kepada pedagang dan entuk bangunan pasar yang tidak sesuai dengan perencanaan awal menjadi bukti bahwa kurangnya

komitmen dari implementor menjadi salah satu penghambat implementasi pengaturan pasar tradisional.

Kondisi Lingkungan

Kondisi lingkungan Pasar Genuk yang sering terkena banjir mengakibatkan terhambatnya aktivitas perdagangan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional belum diimplementasikan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa tindakan, kegiatan, atau aktivitas yang belum diterapkan secara maksimal dan menyeluruh sesuai dengan tujuan pengaturan pasar tradisional yang sudah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013.

Faktor Pendorong:

1. Koordinasi
2. Kondisi Sosial dan kemajuan teknologi

Faktor Penghambat:

1. Kepemimpinan
2. Komunikasi
3. Tingkat komitmen imlementor
4. Kondisi lingkungan

B. Saran

Berdasarkan pemaparan tentang implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional, masih ditemukan beberapa kekurangan. Maka dari itu, untuk mengatasi kekurangan tersebut diperlukan beberapa langkah.

1. Dinas Perdagangan harus mengadakan program pelatihan tentang kepemimpinan untuk seluruh Kepala UPTD Pasar dan Kepala Pasar.
2. Dinas Perdagangan harus memperbaiki sistem komunikasi antar berbagai pihak pelaksana kebijakan. Sistem komunikasi yang bersifat horizontal antara Dinas Perdagangan dengan Dinas lain maupun sistem

- komunikasi yang bersifat vertikal antara Dinas Perdagangan dengan Kepala UPTD Pasar atau Kepala Pasar.
3. Dinas Perdagangan harus melakukan kontrol rutin terhadap kinerja dari aktor implementasi pengaturan pasar tradisional.
 4. Dinas Perdagangan bersama instansi terkait harus melakukan perbaikan terhadap fasilitas pasar tradisional guna mengurangi dampak yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: alfabeta.
- Ekowati, Mas Roro Lilik. 2009. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan*. Surakarta: Pustaka Citra.
- Fermana, Surya. 2009. *Kebijakan Publik: Sebuah Tinjauan Filosofis*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Herabudin. 2016. *Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gavamedia.
- Nasution, S. 2012. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy (edisi revisi)*. Jakarta: PT Elex Media.
- Muhardi. 2007. *Strategi Operasi Untuk Keunggulan Bersaing*. Yogyakarta: Garaha Pustaka
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Purwanto, Agus dkk. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta: Gaya Media
- Sadilah, Emilia dan kawan-kawan. 2011. *Eksistensi Pasar Tradisional: Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional di Kota Semarang, Jawa Tengah*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2008. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES.
- Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep,*

- Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remana Rosdakarya.
- Suwitri, Sri. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Syafii, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Tangkilisan, H.N. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita.
- Wiratha, I Made. 2006. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Skripsi/Jurnal**
- Erliana Nurul Anggraeni. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional. *Skripsi*. Universitas Indonesia.
- Kasiati, NS & Ni Wayan Dwi Rosmalawati. 2016. *Kebutuhan Dasar Manusia I (Modul Bahan Ajar)*. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- Kiki Tri Susilo. 2016. Analisis Pengaruh Variasi Produk, Harga, dan Kemampuan Daya Beli Terhadap Minat Beli Konsumen. *Skripsi*. Universitas Muria Kudus.
- Muhammad Kosim Sirojudin. 2012. Definisi Dan Teori Kepemimpinan. *Publikasi Ilmiah*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Wahyu Savitri. 2015. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional di Kota Semarang. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Dasar Hukum**
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Dinas
Perdagangan Kota Semarang
Peraturan Walikota Semarang Nomor
84 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas
Perdagangan Kota Semarang
Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 9 Tahun 2004 Tentang
Rencana Detail Tata Ruang
Kota Semarang
RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun
2016 -2021
Masterplan Pembangunan Pola
Perpasaran Kota, BAPPEDA
Kota Semarang.
Provil Dinas Perdagangan Kota
Semarang Tahun 2016 – 2021

Internet

<http://industri.bisnis.com/read/20140226/12/206343/pasar-tradisional-berkurang-3.000-unit-apa-penyebabnya>. (Diakses pada 22 September 2016, Pukul 10.03)

<http://properti.kompas.com/read/2014/10/02/163318621/Pasar.Rakyat.Tradisi.yang.Terus.Menyusut.dan.Terlupakan>. (Diakses pada 10 September 2016, Pukul 14.38)

<http://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/31/model-kerangka-analisis-implementasi-daniel-mazmanian-dan-paul-a-sabatier/> (Diakses pada 22 November 2016, Pukul 19.27)

<http://otda.kemendagri.go.id/index.php/edisi-1/126-revisi-uu-pemda-agar-pemerintahan-daerah-lebih-efektif> (Diakses pada 2 November 2016, Pukul 20.05).

<http://jateng.tribunnews.com/2013/08/31/pemkot-anggarkan-rp-16-miliar-untuk-pembangunan-pasar-genuk> (Diakses pada 31 Maret 2018, Pukul 06.18)